

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita. Hal 146-147

Buku Petunjuk Singkat *Online Single Submission (OSS) DPTMPTSP Kota Medan*. 2019

Drs.AG.SUBARSONO.M.Si.,MA. *Analisis Kebijakan Publik*. 2005. Pustaka Penerbit. Yogyakarta.

Fermana, S. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Helaluddin, Hengki Wijaya. *Analiss Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (edisi keenam)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik* . Bandung: TrunRTH

Wiwin Yuliani. 2018. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. Quanta. Vol.2. No.2.

Undang – Undang

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*

Website

Kontan.co.id. 2018. *Ini sanksi daerah yang tak layani online single submission (OSS)*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss> [dikunjungi 23 Maret 2022]

dari, K. (2004). *kota di Jawa Barat, Indonesia*. [online] Wikipedia.org. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok [dikunjungi 26 Maret 2022].

Berita Depok. 2021. *Dukung Peluncur OSS-RBA Pemkot Depok Berkomitmen Ciptakan Perizinan Tidak Berbelit-belit*. <https://berita.depok.go.id/pemerintahan/dukung-peluncuran-oss-rba-pemkot-depok-berkomitmen-ciptakan-perizinan-tidak-berbelit-belit-7943> [dikunjungi 23 Maret 2022]

Bisnis.com (28 Juli 2018)

Katadata.co.id. 2019. Kepala BKPM Akui Sistem Izin OSS Terkendala Software dan Konektivitas. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a55501b104/kepala-bkpm-akui-sistem-izin-oss-terkendala-software-dan-konektivitas>. [dikunjungi 25 Maret 2022]

Bpk.go.id. (2018). *PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018> [dikunjungi 27 Maret 2022].

Jurnal

Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, Femmy Tasik. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. Vol 3

Kertya Witaradya - Governance Consultant. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/> [dikunjungi 27 Maret 2022].

Wahyudi, A. (2016). *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2), 101-105. <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113.
- Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai*. *Journal of Management*, 2(2).
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/568/553>

Skripsi

- Asma husna. 2020. *IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPTEN ACEH TENGGARA*. Medan. Hal 25
- Hendra Ari Purnomo Aji. 2019. *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus : Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo)*. Situbondo.
- Hisyam Afif Al Fawwaz. 2019. *Implementasi Sistem Online Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam)*. Ngawi.
- Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/1661/>
- Soufika Rachmi. 2019. *Implementasi Pelayanan Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang*. Deli Serdang.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Uraian Pertanyaan	Informan
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tujuan dari Kebijakan system OSS ? 2. Bagaimana standar pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut? 3. Apakah yang menjadi ukuran atas keberhasilan kebijakan system OSS tersebut? 4. Siapa yang menjadi sasaran kebijakan system OSS tersebut? 5. Berapa banyak kelompok sasaran yang ada? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan(penanggung jawab system OSS) 2. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 3. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS)
2	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah seluruh staf dan pejabat yang berwenang telah mengetahui adanya kebijakan/peraturan daerah tersebut? 2. Bagaimana kesiapan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut? 3. Berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut? 4. Bagaimana dengan kompetensi para pegawai? Apakah memiliki kompetensi/pemahaman yang baik terhadap kebijakan tersebut? 5. Apakah tersedia sumber daya finansial (anggaran) yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan(penanggung jawab system OSS) 2. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS)

		6. Apakah tersedia waktu yang cukup untuk proses implementasinya?	
3	Hubungan Antar Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi Kebijakan system OSS ? 2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan Kebijakan tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan(penanggung jawab system OSS) 2. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 3. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS)
4	Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana struktur organisasi pelaksana? 2. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah sudah sesuai dalam melaksanakan aturan serta dalam memberikan sanksi hukum? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan(penanggung jawab system OSS) 2. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 3. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 4. Pelaku usaha 1 5. Pelaku usaha 2
5	Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut? 2. Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial-ekonomi kelompok sasaran? 3. Apakah elite politik yang ada mendukung implementasi kebijakan system OSS? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan(penanggung jawab system OSS) 2. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 3. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 4. Pelaku usaha 1 5. Pelaku usaha 2

		4. Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system OSS tersebut?	
6	Disposisi/Sikap Implementor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana respons implementor atas kebijakan system OSS tersebut? 2. Apakah implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan system OSS tersebut? 3. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan(penanggung jawab system OSS) 2. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 3. Staff DPMPTSP(yang menjalankan system OSS) 4. Pelaku usaha 1 5. Pelaku usaha 2



Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Key Informan

Informan Peneliti : Bapak Niko Pahlawan
Tempat : DPMPTSP Kota Depok
Hari dan Tanggal : Senin, 04 Juli 2022

- 
- Peneliti** : “Menurut bapak, apakah tujuan dari kebijakan system OSS ?

Informan : “Tujuannya mempermudah proses perizinan berusaha, ada 2 macamm jenisnya yang berbasis izin dan resiko kalau dulu untuk yang berbasis izin pelaku usaha harus membuat pemenuhan komitmen kalau sekarang kebijakan yang berbasis resiko, dilihat dari seberapa besar resiko-resikonya yang terparing didalam kbli. Intinya, mempermudah proses perizinan berusaha.”
 - Peneliti** : ”Bagaimana standar pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?”

Informan : “Standar pelaksanaannya sudah tertuang di PP 5 Tahun 2021 , dari SOP nya, kebijakan kewenangannya dimana sudah tertuang dalam PP 5 Tahun 2021.”
 - Peneliti** : “Apakah yang menjadi ukuran atas keberhasilan kebijakan system OSS tersebut ?”

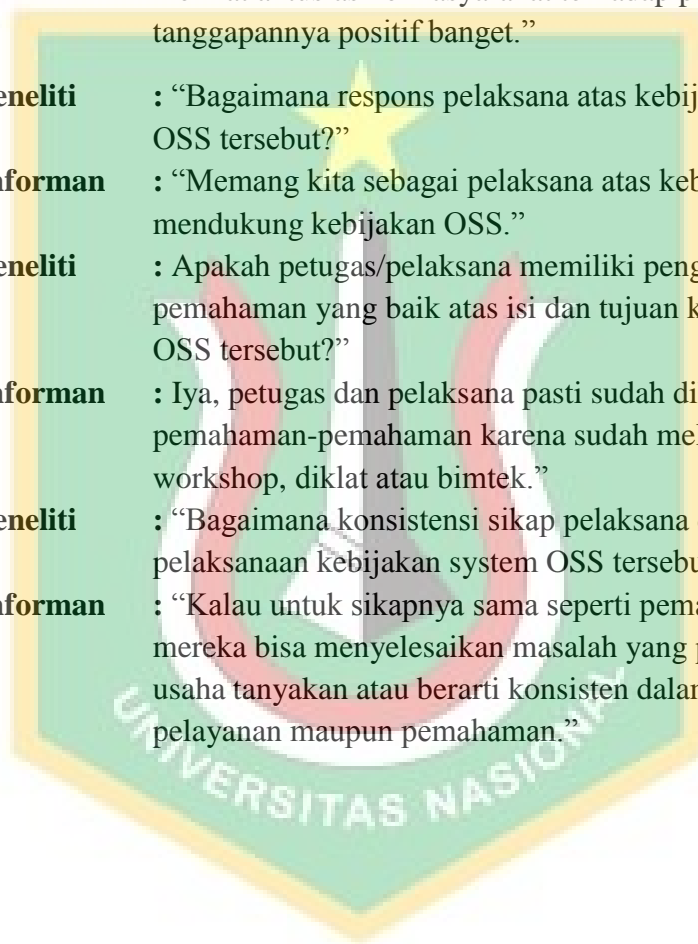
Informan : “Tolak Ukurnya masyarakat lebih antusias, karena OSS bisa bermohon secara pribadi, mandiri, dan tanpa maupun pihak ketiga.”
 - Peneliti** : “Siapa yang menjadi sasaran kebijakan system OSS tersebut? “

Informan : ”Masyarakat terutama UMK (Usaha Mikro dan Kecil)”

5. **Peneliti** : “Berapa banyak kelompok sasaran yang ada?”
Informan : “Ada 2, UMK dan Non UMK”
6. **Peneliti** : “Apakah seluruh pelaksana dan pejabat yang berwenang telah mengetahui adanya kebijakan/peraturan daerah tersebut? “
Informan : “Semuanya sudah mengetahui, karena memang OSS sudah ada 2018 jadi sekarang fokusnya ke masyarakat.”
7. **Peneliti** : “Bagaimana kesiapan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?”
Informan : “Ada sosialisasi ke masyarakat lebih banyak ke UMK dan untuk para pengusaha pun kami adakan sosialisasi”
8. **Peneliti** : “Berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?”
Informan : “Kalau dari sisi kita sumber daya ada loket perbantuan yang sudah terlatih sebagai pendamping pengimplementasian system OSS.”
9. **Peneliti** : “Bagaimana dengan kompetensi para pelaksana? Apakah memiliki kompetensi / pemahaman yang baik terhadap kebijakan tersebut?”
Informan : Para pelaksana dan tenaga pendamping disini sudah dapat bimbingan teknis dan mengikuti workshop, memang pada dasarnya sumber dayanya masih kurang karena antusias dari masyarakat walaupun kurang dari kami terdapat tenaga pendamping 2 dan bisa berusaha secara mandiri
10. **Peneliti** : “Apakah tersedia sumber daya finansial (anggaran) yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?”
Informan : “Anggarannya mengikuti peraturan daerah, karena harus ada turunan dari PP 5 Tahun 2021 ke daerah untuk implementasi OSS.”

11. **Peneliti** : “Apakah tersedia waktu yang cukup untuk proses implementasinya?”
- Informan** : “Karena masih masa transisi dari manual ke OSS kendala nya banyak jadi waktunya pun cukup banyak.”
12. **Peneliti** : “Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan system OSS ?”
- Informan** : “Lebih banyaknya ke para pengusaha karena mereka yang mengimplementasikan kebijakan OSS di system mereka sebagai legalitas perusahaan, jadi pada intinya pelaku usaha.”
13. **Peneliti** : “Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan Kebijakan tersebut?”
- Informan** : “Koordinasinya kita memberitahukan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi.”
14. **Peneliti** : “Bagaimana struktur organisasi pelaksana?”
- Informan** : “Bagan strukturnya ada di dalam file, disitu sudah terdapat bagian-bagian yang detail.”
15. **Peneliti** : “Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah sudah sesuai dalam melaksanakan aturan serta dalam memberikan sanksi hukum?”
- Informan** : “Untuk saat ini sudah sesuai, karena kami sudah dibekali dengan workshop dan sosialisasi mengenai kebijakan ini.”
16. **Peneliti** : “Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : Karena DPMPTSP sebagai user, jadi sumber daya ekonomi untuk masyarakat sendiri akan meningkat karena sangat mudah untuk mendapatkan legalitas.
17. **Peneliti** : “Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial-ekonomi kelompok sasaran?”
- Informan** : “Karena kebijakan OSS bersifat sangat mudah, jadi kondisi social dan ekonomi mereka lebih terdongkrak karena kalau sebelum kebijakan OSS mereka berfikiran membuat izin usaha itu lama dan susah.”
18. **Peneliti** : :Apakah elite politik yang ada mendukung implementasi kebijakan system OSS?”

- Informan** : “Harus mendukung karena ini kebijakan pemerintah karena sudah diatur PP 5 tahun 2021 baik di pusat, daerah, ataupun di kabupaten/kota sudah mendukung.”
19. **Peneliti** : “Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Tanggapan public ada pro dan kontra karena setiap kebijakan ada suka dan tidaknya, tetapi secara keseluruhan melihat antusiasme masyarakat terhadap perizinan berusaha tanggapannya positif banget.”
20. **Peneliti** : “Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Memang kita sebagai pelaksana atas kebijakannya, kita mendukung kebijakan OSS.”
21. **Peneliti** : Apakah petugas/pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : Iya, petugas dan pelaksana pasti sudah dibekali pemahaman-pemahaman karena sudah melakukan workshop, diklat atau bimtek.”
22. **Peneliti** : “Bagaimana konsistensi sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Kalau untuk sikapnya sama seperti pemahamannya, jadi mereka bisa menyelesaikan masalah yang para pelaku usaha tanyakan atau berarti konsisten dalam melaksanakan pelayanan maupun pemahaman.”



Informan Utama

Informan Peneliti : Mas Rizal
Tempat : DPMPTSP
Hari dan Tanggal : Senin, 04 Juli 2022

Standar dan Sasaran Kebijakan

1. **Peneliti** : “Menurut mas, apakah tujuan dari kebijakan system OSS ?”
Informan : “Mempersimple system yang tadinya tiap daerah berbeda beda sekarang menjadi satu.”
2. **Peneliti** : ”Bagaimana standar pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?”
Informan : “Sekarang sudah online, orang bisa akses perizinan dengan mudah disini hanya membantu kendala yang ada.”
3. **Peneliti** : “Apakah yang menjadi ukuran atas keberhasilan kebijakan system OSStersebut ?”
Informan : “Satu system bisa membuat semua perizinan.”
4. **Peneliti** : “Siapa yang menjadi sasaran kebijakan system OSS tersebut? “
Informan : ” Semuah elemen masyarakat, perseorangan maupun badan usaha.”
5. **Peneliti** : “Berapa banyak kelompok sasaran yang ada?”
Infroman : “Semua kalangan yang ada.”
6. **Peneliti** : “Apakah seluruh pelaksana dan pejabat yang berwenang telah mengetahui adanya kebijakan/peraturan daerah tersebut? “
Infroman : “Pada saat diterbitkannya system OSS ini sudah tahu dan langsung di sosialisasikan.”
7. **Peneliti** : “Bagaimana kesiapan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakaan system OSS tersebut?”

- Informan** : “Dari segi kesiapan dari kamu sudah membuka loket khusus OSS, punya loket tersendiri dan SDM nya rata-rata sudah mendapat pelatihan.”
8. **Peneliti** : “Berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Untuk loketnya 2 tapi dalam pelaksanaannya kita berempat”
9. **Peneliti** : “Bagaimana dengan kompetensi para pelaksana? Apakah memiliki kompetensi / pemahaman yang baik terhadap kebijakan tersebut?”
- Informan** : “Iya, karena pelaksana sudah mendapat pelatihan sebelumnya.”
10. **Peneliti** : “Apakah tersedia sumber daya finansial (anggaran) yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Kalau anggaran kurang begitu paham yang saya tahu dari BPKM pusat memberikan computer dan printer”
11. **Peneliti** : “Apakah tersedia waktu yang cukup untuk proses implementasinya?”
- Informan** : “Sudah cukup mulai dari sosialisasi sampai pelaksanaan.”
12. **Peneliti** : “Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan system OSS ?”
- Informan** : “Dari pimpinan sampai kebawah terlibat semua”
13. **Peneliti** : “Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan Kebijakan tersebut?”
- Informan** : “Sangat baik sehingga system OSS ini jadi mempermudah kebijakan dari yang sebelumnya”
14. **Peneliti** : “Bagaimana struktur organisasi pelaksana?”
- Informan** : “Yang melayani 2 dengan pemahaman yang baik dan penanggung jawab 1 yang lebih paham mengenai system OSS ini.”
15. **Peneliti** : “Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah sudah sesuai dalam melaksanakan aturan serta dalam memberikan sanksi hukum?”
- Informan** : “Dalam pelaksanaannya sesuai yang kita dapat dari pelatihan sehingga bisa mengimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaannya.”

16. **Peneliti** : “Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Sumber daya ekonomi yang diberikan computer dan printer dari BPKM pusat atau kementrian investasi.”
17. **Peneliti** : “Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial-ekonomi kelompok sasaran?”
- Informan** : “Kalau menurut saya jadi mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tadinya harus bolak-balik sekarang bisa dari rumah.”
18. **Peneliti** : :Apakah elite politik yang ada mendukung implementasi kebijakan system OSS?”
- Informan** : “Iya mendukung, karena buktinya ada pelayanan untuk system OSS.”
19. **Peneliti** : “Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Mempermudah yang tadinya bikin perizinan butuh 7-10 hari kerja sekarang langsung terbit dari system OSS”
20. **Peneliti** : “Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Dari segi saya lebih mempermudah pekerjaan dan menurut saya lebih membantu masyarakat dalam berusaha”
21. **Peneliti** : “Apakah petugas/pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Karena kita melalui pelatihan sedikitnya dapat pengetahuan dan dapat pemahaman system OSS itu tujuannya seperti apa”
22. **Peneliti** : “Bagaimana konsistensi sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?”
- Informan** : “Karena adanya 2 loket khusus melayani system OSS pelaksanaanya berjalan dengan baik dan konsisten memberi pemahaman kepada para pelaku usaha jika ada kendala.”

Informan Pendukung

Informan Peneliti : Bapak Juli
Tempat : DPMPTSP
Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022

Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan mengenai penerapan system baru OSS pada pelayanan perizinan berusaha?

“Pada awal – awalnya sistem OSS ini ada sih rada bikin pusing belum lagi harus nunggu prosesnya lama terus jaringannya gitu dek. Tapi nanti juga akan diberitahu sih bagaimana caranya.”

2. Sejauh mana efektivitas penerapan OSS pada pelayanan perizinanberusaha?

“sudah efektif, karena sekarang kan jaringannya udah kuat terus juga sistemnya mungkin sudah terus dioptimalkan sehingga tidak terjadinya proses yang lama lagi seperti dulu ingin membuat izin usaha.sekarang dengan adanya penerapan sistem OSS jadi lebih mudah ga sesulit tahun lalu awal – awal masuk sistem OSS.”

Sumber Daya

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai perbandingan penggunaan program lama (manual) dengan penerapan system OSS pada pelayanan perizinan berusaha? Mulai dari proses layanan hingga penerbitan izin berusaha. Apakah sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan juga sebanding?

“perbandingan antra pembuatan izin usaha yang manual sama sekarang yang OSS sih ya, mungkin kalau dulu kan jadi pembuatannya waktu yang lama, fasilitasnya juga belum memadai dan juga pasti harus membawa – bawa berkas penting dulu hingga bertemu petugas lalu didaftarkannya ke perizinan usaha. Kalau sekarangkan dari fasilitasnya juga sudah memadai seperti komputer, jaringan komputer, jaringan internet dan banyak petugasnya jadi sekarang si lebih terbantu si dek dengan adanya sistem OSS ini dan juga sekarang tidak butuh waktu yang cukup lama hanya beberapa menit kalau kita sudah tau.”

Komunikasi Antar Organisasi

1. Sejauh mana pemahaman anda mengenai alur, tahapan dan proses penerapan OSS pada pelayanan penerbitan perizinan berusaha?

“jadi kita selaku pelaku usaha harus memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID, lalu ditanya usahanya berbentuk apa kecil atau besar, lalu aktivasi akun OSSnya, masukkan data – datanya dibantu petugas, habis itu sudah nunggu beberapa menit kalau sudah lengkap semua data – datanya langsung jadi surat izin usaha kita.”

2. Menurut anda sejauh mana peran pelaksana terkait dalam proses pelayanan perizinan berusaha sebelum dan sesudah penerapan system OSS diberlakukan?

“Untuk sosialisasi sendiri saya baru mengetahuinya ketika saya datang ke kantor DPMPTSP saat ingin mengurus izin. Kemudian staf yang melayani kami juga menjelaskannya dengan baik ya jadi saya cukup mengerti. Jadi kalau mengenai informasi Sistem OSS ini ya sebelumnya saya belum mengetahui kalau saya tidak datang ke kantor”

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Mungkinkah atau pernahkah terjadi konflik social, lingkungan dan sebagainya setelah izin berusaha diterbitkan melalui OSS?

“sejauh ini ga ada sih dek, mungkin hanya masyarakat yang belum mengerti dengan adanya sistem baru”

2. Bagaimana tindakan dinas terkait dengan pemecahan konflik yang terjadi?

“karena belum pernah juga jadi saya kurang tau sekali tuh dek tentang gimana cara penyelesaiannya staff kalo ada konflik”

3. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah sudah sesuai dalam melaksanakan aturan serta dalam memberikan sanksi hukum?

“Mereka memberi pengarahan dengan baik sehingga kami sebagai pelaku usaha mengerti dengan keterangan – keterangan yang diberikan.apalagi dengan Sistem OSS ini pelayanan saya lihat semakin mudah. Yang melayani 2 dengan pemahaman yang baik dan penanggung jawab 1 yang lebih paham mengenai system OSS ini. Dalam pelaksanaannya sesuai yang

kita dapat dari pelatihan sehingga bisa mengimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaannya”

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

1. Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?

“Cukup yaa menurut saya sih, karena dilihat dari pemahaman agen pelaksana terhadap kebijakan sistem OSS ini sangat bagus, mengerti apa yang semua kami tanyakan ”

2. Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran?

“Menurut saya, karena semakin mudahnya sistem kebijakan perizinan berusaha yang baru ini membuat kita sebagai pelaku usaha merasa dimudahkan jadi itu yang bisa membuat kondisi social ekonomi kami sebagai masyarakat dan pelaku usaha naik dan terpengaruh atas kebijakan tersebut

3. Apakah kelompok politik yang ada mendukung implementasi kebijakan system OSS?

“ Kalo menurut saya sih mendukung yaa, karena jika tidak satu suara untuk mendukung kebijakan ini tidak akan terimplementasikan sebaik ini

4. Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system OSS tersebut?

“baik, dan mungkin dengan diadakannya kebijakan sistem OSS ini lebih mempermudah dan mempercepat kegiatan untuk membuat izin usaha masyarakat jadi saya sangat mendukung apa yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat.”

Disposisi/Sikap Pelaksana

1. Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system OSS tersebut?

“sudah baik dari penyampaian dan pemberitahuan petugas tentang sistem OSS ini, juga petugas mengerti dengan apa yang ingin disampaikan pada kebijakan ini sehingga dapat menciptakan suasana dan keberhasilan suatu kebijakan itu.”

2. Apakah pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan system OSS tersebut?

“ohh, tentu saja sudah seperti apa yang saya katakan tadi sebelumnya petugas sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana tujuan dari kebijakan ini akan diberikan kepada masyarakat yang ingin mengurus izin usaha dengan lebih mudah.”

3. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?

“konsistensi sikapnya itu baik, tidak berbelit dan juga dapat dipahami sehingga mempermudah dan dapat mempercepat pembuatan izin usaha.”



Informan Pendukung

Informan Peneliti : Ibu Dwinasari
Tempat : DPMPTSP
Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022

Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan mengenai penerapan system baru OSS pada pelayanan perizinan berusaha?

“mengenai penerapan sistem OSS ini ya de, saya rasa si sudah baik daripada tahun lalu yang masih adanya kesulitan dalam pembuatan perizinan usaha. Pada awal – awalnya sistem OSS ini ada sih rada bikin pusing belum lagi harus nunggu prosesnya lama terus jaringannya gitu de.”

2. Sejauh mana efektivitas penerapan OSS pada pelayanan perizinanberusaha?

“sudah efektif, karena sekarang dengan adanya penerapan sistem OSS jadi lebih mudah ga sesulit tahun lalu awal – awal masuk sistem OSS, sekarang kan jaringannya udah kuat terus juga sistemnya mungkin sudah terus dioptimalkan sehingga tidak terjadinya proses yang lama lagi seperti dulu ingin membuat izin usaha.”

Sumber Daya

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai perbandingan penggunaan program lama (manual) dengan penerapan system OSS pada pelayanan perizinan berusaha? Mulai dari proses layanan hingga penerbitan izin berusaha. Apakah sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan juga sebanding?

“perbandingan antra pembuatan izin usaha yang manual sama sekarang yang OSS sih ya, mungkin kalau dulu kan karena masih manual jadi pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, fasilitasnya juga belum memadai dan juga pasti harus membawa – bawa berkas penting dulu hingga bertemu petugas lalu didaftarkannya ke perizinan usaha. Kalau sekarangkan dari fasilitasnya juga sudah memadai seperti komputer, jaringan komputer, jaringan internet dan banyak petugasnya jadi sekarang si lebih terbantu si dek dengan adanya sistem OSS ini.”

Komunikasi Antar Organisasi

1. Sejauh mana pemahaman anda mengenai alur, tahapan dan proses penerapan OSS pada pelayanan penerbitan perizinan berusaha?

“jadi kita selaku pelaku usaha harus memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID, lalu ditanya usahanya berbentuk apa kecil atau besar, lalu aktivasi akun OSSnya, masukkan data – datanya dibantu petugas, habis itu sudah nunggu beberapa menit kalau sudah lengkap semua data – datanya langsung jadi surat izin usaha kita.”

2. Menurut anda sejauh mana peran pelaksana terkait dalam proses pelayanan perizinan berusaha sebelum dan sesudah penerapan system OSS diberlakukan?

“peran petugas disini selama saya mengurus izin usaha dari sebelum adanya sistem OSS sampe sekarang udah ada sih ya de, pas sebelum adanya sistem OSS ini ya kaya biasanya aja ramah, baik, sopan sama sabar terus juga dulu dikasih tau apa aja yang harus di keluarin untuk dimasukkin datanya. Nah kalau sekarang masih sama juga de, tapi kan yang beda kita di awal – awal belum tau apa itu sistem OSS, gimana pakemnya petugas kemarin memberitahu itu tahap – tahapannya, bagaimana sistemnya, apa saja yang harus dibawa nantinya seperti itu si dek, ya sudah baik sekali si pelaksanaannya.”

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Mungkinkah atau pernahkah terjadi konflik social, lingkungan dan sebagainya setelah izin berusaha diterbitkan melalui OSS?

“sejauh ini sepertinya ga ada, mungkin hanya masyarakat yang belum mengerti dengan adanya sistem baru tetapi itu sudah langsung ditangani oleh petugasnya dengan baik dan sopan.”

2. Bagaimana tindakan dinas terkait dengan pemecahan konflik yang terjadi?

“dengan memberikan pemberitahuan menggunakan bahasa yang baik dan sikap yang sopan santun sehingga tidak menyebabkan konflik yang akan terjadi.”

3. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah sudah sesuai dalam melaksanakan aturan serta dalam memberikan sanksi hukum?

“sudah sesuai, karakteristik yang ada pada dinas ini si yang saya liat itu lebih mengedepankan kepuasan masyarakat, ya karena kan mereka bekerja untuk melayani masyarakat jadi ya sudah sesuai dengan hukum yang ada.”

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

1. Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?

“ Menurut saya cukup yaa, karena dilihat dari pemahaman agen pelaksana terhadap kebijakan sistem OSS ini sangat bagus, mengerti apa yang semua kami tanyakan ”

2. Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran?

“Menurut saya, karena semakin mudahnya sistem kebijakan perizinan berusaha yang baru ini membuat kita sebagai pelaku usaha merasa dimudahkan jadi itu yang bisa membuat kondisi social ekonomi kami sebagai masyarakat dan pelaku usaha naik dan terpengaruh atas kebijakan tersebut”

3. Apakah kelompok politik yang ada mendukung implementasi kebijakan system OSS?

“ Kalo menurut saya sih mendukung yaa, karena jika tidak satu suara untuk mendukung kebijakan ini tidak akan terimplementasikan sebaik ini

4. Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system OSS tersebut?

“baik, dan mungkin dengan diadakannya kebijakan sistem OSS ini lebih mempermudah dan mempercepat kegiatan untuk membuat izin usaha masyarakat jadi saya sangat mendukung apa yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat.”

Disposisi/Sikap Pelaksana

1. Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system OSS tersebut?

“sudah baik dari juga petugas mengerti dengan apa yang ingin disampaikan pada kebijakan ini sehingga dapat menciptakan suasana dan keberhasilan suatu kebijakan itu, penyampaian dan pemberitahuan petugas tentang sistem OSS ini.”

2. Apakah pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan system OSS tersebut?

“ohh, tentu saja sudah seperti apa yang saya katakan tadi sebelumnya petugas sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana tujuan dari kebijakan ini akan diberikan kepada masyarakat yang ingin mengurus izin usaha dengan lebih mudah.”

3. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?

“konsistensi sikapnya itu baik, tidak berbelit dan juga dapat dipahami sehingga mempermudah dan dapat mempercepat pembuatan izin usaha.”



Lampiran 3



Foto Bersama Bapak Niko Pahlawan, A.Md., selaku Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan.

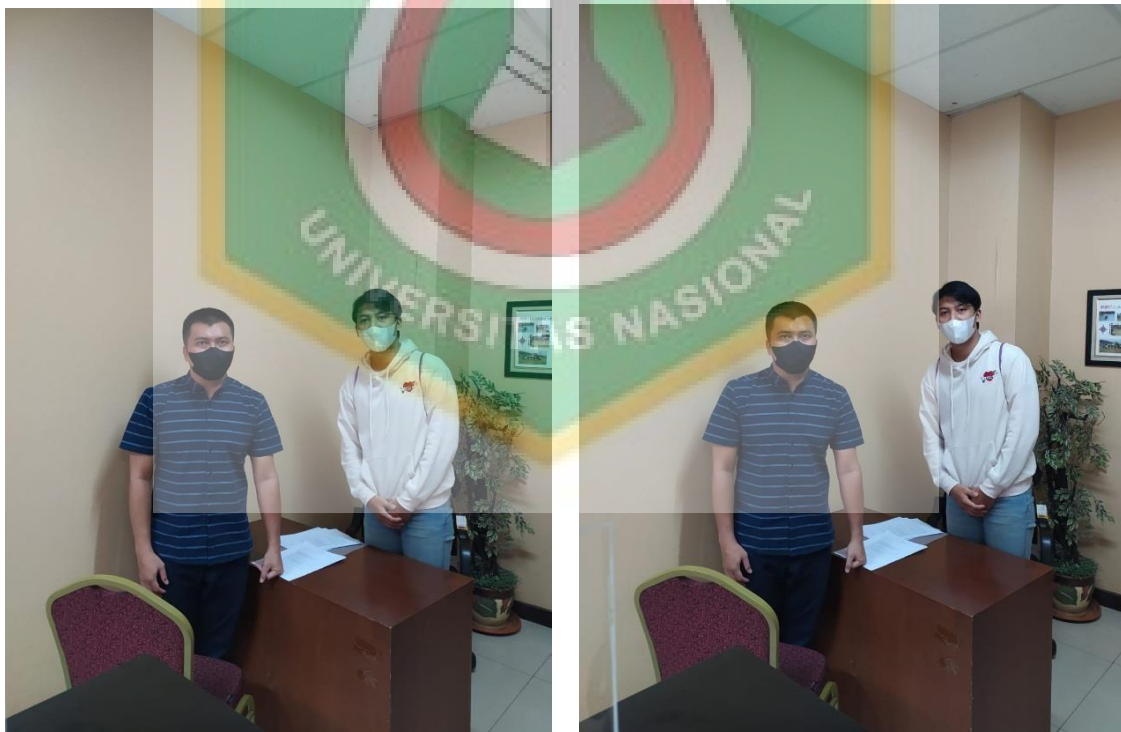


Foto Bersama Bapak Rizal Selaku Staff DPMPTSP yang menjalankan Perizinan Usaha Sistem OSS.



Foto Bersama Masyarakat Selaku Pelaku Usaha yang mengurus Perizinan Usaha Sistem OSS.



Foto Situasi atau Lokasi Kantor DPMPTSP Kota Depok.

Lampiran 4

izin usaha 2020 [Compatibility Mode] - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I
447	E9482F	TASRIPIH, ST	PT. EXCELENCIA TRUST MEDICA	Jl. Taman Duta Timur Blok 82 No. 3, Rt: 002, Rw. 005, Kel: CICALAK, Kec: SUKMAJAYA	Izin Usaha Perdagangan Perubahan Data	17 Desember 2020	16 Desember 2023	0854-F2-10-27/PK/XII/2020
448	C1F4A8	IVAN HERLAMBAANG	PT. GENTA BUANA ASTADECA	Jl. Citayam Raya Ruko Kartini Blok C, No 35-36, Rt: 001, Rw: 002, Kel: DEPOK, Kec: PANCORAN MAS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	22 Desember 2020	21 Desember 2023	0013/10-27/P8/XII/2020
449	46E5FD	DANANG SWASTIAWAN	PT. FORWARD DWIMANDIRI ESTETIKA	Jl. Paksiapan, No 117, Rt: 001, Rw: 006, Kel: SUKARTI, Kec: TAPOS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	22 Desember 2020	21 Desember 2023	0075/10-27/PM/XII/2020
450	B49824	INDRA KUSUMA NUGRAHA	Nur Andhita	Jl. Raya Gandul No. 13, Rt: 002, Rw: 002, Kel: GANDUL, Kec: CINERE	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	22 Desember 2020	21 Desember 2023	0209/10-27/PK/XII/2020
451	12B37A	MUH. JAMAL NAZAR	PT. GHANIYA BERKAH	Jl. Angrek Gas Alam, Rt: 004, Rw: 007, Kel: CURUG, Kec: CIMANGGIS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	22 Desember 2020	21 Desember 2023	0210/10-27/PK/XII/2020
452	44FD2A	LIM KHUN HWAT	TB. Fajar Abadi	Jl. Raya Ciputat Parung, Rt: 001, Rw: 007, Kel: BOJONGSARI BARU, Kec: BOJONGSARI	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	22 Desember 2020	21 Desember 2023	0212/10-27/PK/XII/2020
453	E7ABF8	PONIAH	CV. ESA UTAMA	Jl. Proklamasi Blok B-31, Rt: 005, Rw: 008, Kel: MEKARAJAYA, Kec: SUKMAJAYA	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	22 Desember 2020	21 Desember 2023	0076/10-27/PM/XII/2020
454	1145F3	BENI RUSDIANA	PT. MITRA SEJATI PROJECT	Perumahan Permata Green Depok Blok C-17, Kel: PONDOK JAYA, Kec: CIPAYUNG	Izin Usaha Perdagangan Perubahan Data	28 Desember 2020	27 Desember 2023	0050-P1-10-27/PM/XII/2020
455	63D027	ABDUL AZIZ MUHTADI	PT. MITRA NUSA SINERGI	Jl. Komodo, No 1, Rt: 001, Rw: 007, Kel: DEPOK JAYA, Kec: PANCORAN MAS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	28 Desember 2020	27 Desember 2023	0014/10-27/P8/XII/2020
456	853C87	MUHANI	PT. ABLEPEDIA SOLUSI BISA	Perumahan Cinere One Residence Ruko Blok No. K8-1, Rt: 007, Rw: 005, Kel: PANGKALANJATI, Kec: CINERE	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	28 Desember 2020	27 Desember 2023	0213/10-27/PK/XII/2020
457	625D23	ESAM DIMAR MOHAMED AZZUBAIDI	PT. INDO SWISS NIAGA LOGISTIK	Jl. Raya Ciputat Parung Ruko No. 1, Rt: 001, Rw: 003, Kel: BOJONGSARI BARU, Kec: BOJONGSARI	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	28 Desember 2020	27 Desember 2023	0077/10-27/PM/XII/2020
458	6824C1	BAMBANG AGUS HARYANTO	CV. SURYA AGRAPANA	Jl. Durian I, Blok D-4, No 10, Rt: 004, Rw: 011, Kel: SUKAMAJU BARU, Kec: PANCORAN MAS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	29 Desember 2020	28 Desember 2023	0214/10-27/PK/XII/2020

laporan_perizinan (56)

Bukti data izin usaha sistem OSS dalam masa transisi tahun 2020

izin usaha micro 2019 [Compatibility Mode] - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I
31	48D913	RIVANTO	Bakmie Ayam Yanto	Jl. Kembang Beji, No 37, Kel: BEJI, Kec: BEJI	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0381/10-27/PMI/IV/2019
32	5E9D4E	DIAN JAYANTI	UDI Danish Jaya / Tahu Bakso Mba Dina	Permata Depok Sektor Mutiara Blok B3, No 16, Kel: PONDOK JAYA, Kec: CIPAYUNG	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0382/10-27/PMI/IV/2019
33	24933A	ESTUTI FITRI HARTINI	Estu Sejahtera	Jl. Rawageni No. 76, Rt: 004, Rw: 001, Kel: RATU JAYA, Kec: CIPAYUNG	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0383/10-27/PMI/IV/2019
34	8DD1D6	SAHARA BUNGA ASIA	Cahaya	Jl. H. Dimun Raya No. 100, Rt: 003, Rw: 022, Kel: SUKAMAJU, Kec: CILODONG	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0384/10-27/PMI/IV/2019
35	A38F72	ITA HARYANTI	Omah VMC	Villa Mutiara Cinere Blok C4/6, Rt: 002, Rw: 011, Kel: GROGOL, Kec: LIMOD	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0385/10-27/PMI/IV/2019
36	31C0B4	MOH FACHRUL ROZZI	Kribu Chips	Kp. Sidamukti, Rt: 003, Rw: 002, Kel: SUKAMAJU, Kec: CILODONG	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0386/10-27/PMI/IV/2019
37	2A7F3F	SRI HARYANI	Emol Indonesia	Griya Ardhani CA, No 4, Kel: SAWANGAN, Kec: SAWANGAN	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0387/10-27/PMI/IV/2019
38	4D9D4F	IMUN MAEMUNAH	SyaQeela	Perumahan Sawangan Village Cluster Palmarosa ES/17, Rt: 006, Rw: 002, Kel: BEDAHAN, Kec: SAWANGAN	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0388/10-27/PMI/IV/2019
39	C74089	TETI ANDAYANI	Jamu Teti	Jl. Stasiun Depok Lama, Rt: 009, Rw: 003, Kel: DEPOK, Kec: PANCORAN MAS	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0389/10-27/PMI/IV/2019
40	9E9D95	LUCY SYLVANA	Kami Creative	Jl. Kecipir, No 101, Kel: BEJI, Kec: BEJI	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0390/10-27/PMI/IV/2019
41	A0DDA1	FAUSIAH HARI SUCI SRI MUNDARI	Ufisa Kebab	Permata Depok Regency, Ruby D18, No 1, Kel: RATU JAYA, Kec: CIPAYUNG	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0391/10-27/PMI/IV/2019
42	2071B8	RIA SEPTIANDA	RK Food Service	Pesona Khayangan Jl. Margonda Raya, Kel: MEKARAJAYA, Kec: SUKMAJAYA	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0392/10-27/PMI/IV/2019
43	766787	YULIANI	Bakso dan Soto Budhe	Jl. Baru, Rt: 008, Rw: 019, Kel: DEPOK, Kec: PANCORAN MAS	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0393/10-27/PMI/IV/2019
44	BF2C7E	MOHAMAD SOFYAN ARIEF	CV. Indra Putri Mandiri	Jl. Wijaya Kusuma, Kel: DEPOK JAYA, Kec: PANCORAN MAS	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Permohonan Baru	29-Apr-19	-	0394/10-27/PMI/IV/2019

laporan_perizinan (54)

Bukti data izin usaha Micro tahun 2019

izin usaha 2019 [Compatibility Mode] - Excel

No	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1060	3EED48	RETNO PRASETYANINGSIH	PT. Warna Kreatif Nusantara	Jl. Irian Jaya, No 269, Rt: 011, Rw: 003, Kel: DEPOK JAYA, Kec: PANCORAN MAS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	26 Desember 2019	24 Desember 2022	0502/10-27/PK/XII/2019	
1061	9ABCCE	HERMAWAN	PT. Aina Sinar Sehat	Jl. Margonda Raya, No 252 b, Rt: 002, Rw: 001, Kel: KEMIRIMUKA, Kec: BEJI	Izin Usaha Perdagangan Perubahan Data	27 Desember 2019	26 Desember 2022	0343-P1/10-27/PM/XII/2019	
1062	3,85E+39	Dr. Muslim Syafei	PT. LISNA ABDI PRIMA	RADEN SANIM, No 1, Rt: 01, Rw: 10, Kel: TANAH BARU, Kec: BEJI	Izin Usaha Perdagangan Perubahan Data	27 Desember 2019	26 Desember 2022	0051-P1/10-27/PM/XII/2019	
1063	36578E	ENDANG LUNGGU SAPUTRA	CV. BERKAH CIPTA UTAMA	Jl. Tugu Jaya Kp. Parung Serab, No 50, Rt: 006, Rw: 003, Kel: TIRTAJAYA, Kec: SUKMAJAYA	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	27 Desember 2019	26 Desember 2022	0503/10-27/PK/XII/2019	
1064	644DB7	GALIH PANDEKAR	PT. LAVENDER BINA CENDIKIA	Jl. Margonda Raya Perkantoran Taman Malati Margonda Lt. 5 Sula A, Rt: 002, Rw: 002, Kel: PONDOK CINA, Kec: BEJI	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	27 Desember 2019	26 Desember 2022	0504/10-27/PK/XII/2019	
1065	13ABF1	RONI SONDRI	PT. SEDIKHA DINAMIKA HUTAMA	Ruko Kartini Jl. Citayam Raya, Rt: 001, Rw: 002, Kel: DEPOK, Kec: PANCORAN MAS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	27 Desember 2019	26 Desember 2022	0215/10-27/PM/XII/2019	
1066	0E1B5E	RURY ARIADI	Toko Tiga Besama Sukses	JL IRIAN JAYA RUKO 26, No., Rt: 001, Rw: 04, Kel: DEPOK JAYA, Kec: PANCORAN MAS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	30 Desember 2019	29 Desember 2022	0505/10-27/PK/XII/2019	
1067	8CACS5	IDA KURNASHI	CV. KURNIADI BOGA UTAMA	JL KEJAYAN, No 293, Rt: 004, Rw: 09, Kel: ABADIJAYA, Kec: SUKMAJAYA	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	30 Desember 2019	29 Desember 2022	0506/10-27/PK/XII/2019	
1068	2F04F6	BAMBANG WINARNO	KOPERASI TERATAI MANDIRI	KSAT. AMU ATAK, Rt: 002, Rw: 004, Kel: PASIR GUNUNG SELATAN, Kec: CUMANGGIS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	30 Desember 2019	29 Desember 2022	0507/10-27/PK/XII/2019	
1069	609F7F	YENI HARTONO	PT. ANEKA MAKMUR ABADI	RP. CILANGKAP, Rt: 002, Rw: 017, Kel: CILANGKAP, Kec: TAPOS	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	30 Desember 2019	29 Desember 2022	0508/10-27/PK/XII/2019	
1070	FLADAF	SAJAJANMILITAN	Toko Sari Hasil	Jl. Nusantara Raya, No 54, Rt: 004, Rw: 013, Kel: BEJI, Kec: BEJI	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	30 Desember 2019	29 Desember 2022	0509/10-27/PK/XII/2019	
1071	9EDC73	TOMY ALDO	PT. ANKKA KARSA MEDIKA	JL RAYA KALIMULYA, No., Rt: 001, Rw: 08, Kel: KALIMULYA, Kec: CILODONG	Izin Usaha Perdagangan Permohonan Baru	30 Desember 2019	29 Desember 2022	0216/10-27/PM/XII/2019	

laporan_perizinan (55)

Bukti data izin usaha Non - Micro tahun 2019

List izin (5) - Excel

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
19489	19.488	I-20220828	SUGENG M	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47214	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19490	19.489	I-20220828	MIFTAKHUL	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47599	28/08/22	Penyarat Dg CPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19491	19.490	I-20220828	EUIS DARAH	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47245	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19492	19.491	I-20220828	DEDEN HID	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47112	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19493	19.492	I-20220828	Asep Komar	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47781	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19494	19.493	I-20220828	SARANA PR	11121002	11/11/21	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	T	47721	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19495	19.494	I-20220828	ANA NUR AL	28200036	19/03/21	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	40794	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19496	19.495	I-20220828	ARIE YUDH	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47112	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19497	19.496	I-20220828	GEM ALAM	12001121	28/12/19	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	46511	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19498	19.497	I-20220828	RATU DAR	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	40794	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19499	19.498	I-20220828	SUBUR HAZ	22200746	22/04/21	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47242	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Menunggu	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19500	19.499	I-20220828	MUHAMMA	280822007	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	46930	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19501	19.500	I-20220828	PRABA CIP	022200090	07/09/20	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	46993	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Menunggu	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19502	19.501	I-20220828	PRABA CIP	022200090	07/09/20	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	MR	50111	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Menunggu	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19503	19.502	I-20220828	PRABA CIP	022200090	07/09/20	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	43142	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Menunggu	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19504	19.503	I-20220828	PRABA CIP	022200090	07/09/20	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	46993	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Menunggu	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19505	19.504	I-20220828	PRABA CIP	022200090	07/09/20	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	43200	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Menunggu	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19506	19.505	I-20220828	BAHIR SEA	280822008	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47215	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19507	19.506	I-20220828	BERLIAN AF	280822001	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47713	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19508	19.507	I-20220828	JATI MAKM	027801023	30/12/20	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	46511	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19509	19.508	I-20220828	JATI MAKM	027801023	30/12/20	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	62019	28/08/22	Penyarat Dg PPKPR	Dari Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19510	19.509	I-20220828	SUPARMAN	280822000	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47244	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19511	19.510	I-20220828	SITI NURYU	280822000	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47248	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					
19512	19.511	I-20220828	SITI SANIS	280822000	28/08/22	PMDN	Jawa Barat	Kota Depok	R	47222	28/08/22	Penyarat Dg SPPL	Bupati/Wali Terbit Otom	Wali Kota Depok-Kepala DPMPSTSP Depok					

Sheet 1

Bukti data izin usaha sistem OSS tahun 2021

Lampiran 5



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360-61, Fax (021) 77217362

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ S-KET/ 280 - DPMPSTP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahman Pujiarto, S.Pd, M.Si
NIP : 197604232003121001
Pangkat/ Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ferriel Aimar Zahwan
NIM : 1983112351550211
Jurusan : Administrasi Publik
Institusi : Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Depok guna menunjang penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 29 Juli 2022

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DEPOK
Sekretaris Dinas



RAHMAN PUJIARTO, S.Pd, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197604232003121001



PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka I Lantai IV,
Jl. Margonda Raya No. 54 Telepon : 021-2941 2287
Faximile : 021-2941 2287 Website : Kesbangpol.depok.go.id Email : badankesbangpol.depok@gmail.com
Kota Depok, Jawa Barat - 16431

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/773 - Bakesbangpol

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
3. Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok.
4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Menimbang : Memperhatikan Surat dari Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Terakreditasi BAN-PT
Nomor : 489/WD/VI/2022
Tanggal : 08 Juni 2022
Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Informasi Data

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama / NIM : Ferriel Aimar Zahwan / 183112351550211
b. Alamat : Rawageni RT. 003/007 Kel. Ratu Jaya - Kec. Cipayang, Kota Depok
Nomor Telepon : 0895 03308065
c. Judul Penelitian : 1) "Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha dengan Sistem OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok"
2) Lokasi Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
3) Waktu/Lama Penelitian : 20 Juni 2022 s/d 20 Juli 2022
4) Anggota Tim Peneliti : -
5) Bidang Penelitian : Administrasi Publik
6) Status Penelitian : Baru

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Depok, 14 Juni 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Catatan :

1. Wajib Melaporkan Hasil Riset/Penelitian/Survei/PKL Ke Badan KESBANGPOL dan Dinas/Instansi Tempat Melakukan Riset/Penelitian/Survei/PKL;
2. Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19;



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext 146, Fax 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 489 /WD/ VI /2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Jakarta, 08 Juni 2022

Kepada Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ferriel Aimar Zahwan
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351550211
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Kp. Rawageni, Jl Dua Putri Rt 03/07 No. 76
HP : 089503308065

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: **Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Dengan Sistem OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.** Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Syaipudin, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan,
Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

BIODATA PENULIS

Nama : Ferriel Aimar Zahwan

NPM : 183112351550211

Tempat tanggal lahir : Depok, 18 Febuari 2001

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Dua Putri Rt 03/07 No. 76, Kota Depok.

No Hp : 089503308065

Email : fazahwan00@gmail.com

Pendidikan Formal

(2006-2012) SDN Depok 2

(2012-2015) SMP PGRI 1 Depok

(2015-2018) SMAN 6 Depok

(2018-2022) Universitas Nasional

Ferriel Aimar Zahwan

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	6%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	repositori.unas.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	journal.uniga.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
11	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
13	repository.fisipkum.unsera.id Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<1%
15	jdih.babelprov.go.id Internet Source	<1%
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
17	www.tumbex.com Internet Source	<1%